

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Indonesia. *Diskursus Hukum Untuk Kesajhteraan Rakyat*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2019.
- Arifin. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Bandung: Mujahid Press, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Julia, *Orientasi Estetik Gaya Pirigan Kacapi Indung dalam Kesenian Tembang Sunda Cianjuran di Jawa Barat*, Jawa Barat: UPI Sumedang Press, 2018.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Kurniawan. *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Kurniawan, Rofyanto dan Wibowo, Tri. *Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk & Ketahanan Pangan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2006.
- Muchti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nandang Sutisna, *Manajemen Risiko Hukum dan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Kencana, 2024.
- Nugroho & Siahaan, *BUMN Indonesia: Isu, Kebijakan, dan Strategi*, Jakarta: Gramedia, 2006.

Nuraini, Candra, dkk. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Surakarta: Lembaga Mutiara Hidup Indonesia, 2021.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2012.

Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realita Bisnis Perusahaan Grup*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Suryabarata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Pers, 2001.

Artikel Jurnal

Andi Rahmat Nizar Hidayat, Rabina Yunus, Rusli, “Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bone.” *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, No.2 (2024): 733.

Jayusman, Dandi dan Setianingrum Reni Budi. “Problematisasi Perusahaan Grup: Bentuk dan Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Media Of Law And Sharia*, Volume. 4 (2023): 133.

M. Suparmoko. “Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik”, *BPFE*, Edisi ke-5 (2003): 34.

Sari Maya, Budiono Abdul Rachmad, dan Widhiyanti Hanif Nur. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Dilibatkan Dalam Proses Akuisisi.” *Yuridika*, Volume. 32, No. 3 (2017): 44.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70).

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Lembar Negara No.160 Tahun 2007. (Tambahan Lembar Negara No.4756).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227).

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 07/KPTS/RC.210/B/02/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/KPTS/RC.210/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023.

Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 08/KPTS/RC.210/B/02/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Ahdiva Dahira Wasyiva, “Analisis Hukum Pidana Terhadap Penjualan Pupuk Bersubsidi Secara Ilegal”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.

Danang Cahyono Putro, “Perlindungan Hukum Bagi Petani Terhadap Praktik Penjualan Pupuk Bersubsidi di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten Boyolali”, Tesis, Universitas Negeri Semarang, 2021.

Hasnah Gazali, “Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021.

Ramlayana, “Efektivitas Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Internet

[https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--temuan-dan-saran-ombudsman-untuk-perbaikan-tata-kelola-pupuk-bersubsidi#:~:text=Sesuai%20Keputusan%20Menteri%20Pertanian%20\(Kepmentan,NPK%20dengan%20formula%20khusus%20kakao.](https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--temuan-dan-saran-ombudsman-untuk-perbaikan-tata-kelola-pupuk-bersubsidi#:~:text=Sesuai%20Keputusan%20Menteri%20Pertanian%20(Kepmentan,NPK%20dengan%20formula%20khusus%20kakao.)

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5774659/mudahkan-petani-mentan-amran-tegaskan-penebusan-pupuk-subsidi-hanya-pakai-ktp?page=2>

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Erry Friedayanti (*Vice President* Hukum Litigasi PT Pupuk Indonesia)

Wawancara dengan Bapak Adi Prasetyo Yudhotomo (Pelaksana Tugas *Vice President* Hukum Litigasi PT Pupuk Indonesia)

Wawancara dengan Bapak Tegas Febriyanto (*Vice President* Hukum Korporasi PT Pupuk Indonesia (Persero))

Wawancara dengan Bapak Rega (*Assisten Officer* Perencanaan & Evaluasi
PSO PT Pupuk Indonesia (Persero))

Wawancara dengan Bapak Rafik Oktawirya (*Junior Officer* Saluran
Penjualan PT Pupuk Indonesia (Persero)).

Wawancara dengan Bapak Markus Rivaldo (Staf Administrasi Departemen
Perencanaan & Pengaturan PSO PT Pupuk Indonesia (Persero)).

Wawancara dengan Bapak Yovianto (Staf Administrasi Departemen
Perencanaan & Pengaturan PSO PT Pupuk Indonesia (Persero)).